

KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI SEPADAN SUNGAI INDRAGIRI, RENGAT, RIAU

Pedia Aldy¹, Mira Dharma S²

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

**Email: ¹aldypedia@gmail.com*

ABSTRACT

Rengat, a capital of Kabupaten Indragiri Hulu, is a developing city in Riau. Development of the city was followed by increasing of population and growth of housing and residential area. Growth of housings and residential area in Rengat City are along Sungai Indragiri. Along this river, housings and residential area have degradation quality and disordered pattern. The purpose of this research was to identify the characteristic of slums area along Indragiri's river. There are 6 Desa (villages) which are been taken to this study, namely Desa Kuantan Baru (industry area), Desa Kuantan Baru, Desa Kampung Dagang, Desa Kampung Besar Kota, Desa Pasar Kota and Desa Sekip Hulu. This research used criteria parameter assessment for slums area. The criteria consist of: non-economic vitality criteria, economy area vitality criteria, land ownership, infrastructures and facilities, and government commitment. This research finding that from 6 villages, Desa Kampung Besar Kota is a slums area, based on parameter assessment. Property Development approach was conducted to handling slums area of Desa Kampung Besar.

Keywords: *characteristics, slums area, Indragiri's river.*

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan perpindahan penduduk ke daerah perkotaan, merupakan penyebab utama pesatnya perkembangan kegiatan suatu kota. Pesatnya perkembangan menyebabkan perubahan struktur kota yang akan mengarah pada kemerosotan suatu lingkungan permukiman dan tidak efisiennya penggunaan tanah kawasan pusat kota.

Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, ditambah dengan adanya keterbatasan sumber daya penduduk (minimnya pendapatan).

Kawasan permukiman pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu kondisi fisiknya, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan dampak oleh kedua kondisi tersebut (Putro, 2011).

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8198,26 Km² yang terdiri dari dataran

rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. Timbulnya kawasan permukiman padat dan kumuh di perkotaan, pada umumnya dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat migran. Penduduk migran tersebut ada karena, mereka memiliki harapan besar untuk hidup lebih baik di perkotaan tanpa mempertimbangkan keahlian dan kesiapan yang mereka miliki untuk hidup di kota. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kaum migran yang tidak terkontrol adalah semakin meluasnya kawasan/lingkungan permukiman perkotaan yang kumuh dan tidak tertata. Khususnya dapat dilihat adanya permukiman yang tumbuh di lahan kritis seperti di daerah sepadan sungai Indragiri (Kec. Rengat).

Permasalahan permukiman tersebut kini juga dirasakan di Kabupaten Indragiri Hulu, terutama dengan semakin tumbuhnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di wilayah perkotaan Rengat dan Air Molek khususnya di daerah sepanjang sepadan Sungai Indragiri yang kualitasnya semakin menurun dan belum dan atau tidak tertata dengan baik.

Maksud dan tujuan dari penelitian permukiman di sepadan Sungai Indragiri (Kec. Rengat) ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan permukiman yang berada di sepadan Sungai Indragiri (Kec. Rengat) Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mendapatkan data kategori dan atau tingkatan kekumuhan maupun kepadatan pada masing-masing kawasan disepanjang sepadan Sungai Indragiri (Kec. Rengat) Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Untuk mengetahui penanganan kawasan permukiman lahan kritis sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Keberadaan lingkungan kawasan permukiman kumuh membawa permasalahan baru, seperti perkembangan fisik kota yang tidak baik, memberikan efek visual yang jelek, tingkat kesehatan masyarakat yang semakin rendah sebagai akibat dari kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan dampak social dan ekonomi masyarakat yang buruk (Putro, 2011).

Ciri-ciri permukiman kumuh (Suparlan dalam Putro, 2011) adalah:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:

- a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah Negara, dan arena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
 6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Ciri-ciri daerah kumuh adalah sangat padat penduduknya, jalan sempit berupa gang-gang kecil, drainase tidak memadai bahkan ada yang tanpa drainase, tidak ada ruang terbuka diantara rumahnya, fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim, fasilitas sumber air bersih sangat minim, tata bangunan yang sangat tidak teratur, sistem sirkulasi udara dalam rumah tidak baik, tidak ada *privacy* bagi penghuni rumah dan berlokasi di pusat kegiatan ekonomi kota (Surahman, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di sepadan sungai Indragiri, Kecamatan Rengat, yang terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Kuantan Baru (lokasi pabrik), Desa Kuantan Baru, Desa Kampung Dagang, Desa Kampung Besar Kota, Desa Pasar Kota, dan Desa Sekip Hulu.

Adapun kriteria sebagai parameter yang digunakan untuk melakukan identifikasi kawasan kumuh antara lain kriteria vitalitas non-ekonomi, vitalitas ekonomi kawasan, status kepemilikan tanah, keadaan prasarana dan sarana, dan komitmen pemerintah kab/kota. Metode pengumpulan data secara observasi langsung pada objek penelitian dan melalui wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan didapati hasil sebagai berikut:

1. Kriteria Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria ini terdiri dari kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang, kondisi bangunan dan kondisi kependudukan. Kondisi bangunan dapat dikategorikan menjadi pertambahan bangunan baru, kepadatan bangunan, bangunan temporer, tapak bangunan, dan jarak bangunan. Sedangkan kondisi kependudukan dapat dikategorikan menjadi kepadatan penduduk dan pertambahan penduduk (Gambar 1-4).



Gambar 1. Kondisi Bangunan di Sepadan Sungai



Gambar 2. Jarak antar Bangunan



Gambar 3. Kepadatan Bangunan

2. Kriteria Vitalitas Ekonomi

Kriteria ini terdiri dari kepentingan kawasan terhadap wilayah sekitar, jarak jangkauan ke tempat kerja, dan fungsi sekitar kawasan.

3. Kriteria Status Tanah

Kriteria ini terdiri dari status tanah yang berdominasi sertifikat lahan dan berdominasi status kepemilikan.

4. Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana

Kriteria ini merupakan kondisi prasarana sarana yang dapat dikategorikan menjadi kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi air bersih, kondisi air limbah, dan kondisi persampahan (Gambar 4).



Gambar 4. Kondisi Sarana dan Prasarana

5. Kriteria Komitmen Pemerintah

Kriteria ini terdiri dari indikasi keinginan pemerintah kota/kabupaten atas pembiayaan dan kelembagaan serta upaya penanganan pemerintah kota/kabupaten atas rencana, penanganan, pembenahan fisik, dan penanganan kawasan.

Hasil identifikasi karakteristik permukiman berdasarkan kriteria dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Permukiman di Sepadan Sungai Indragiri

Kriteria	Desa					
	Kuantan Baru (pabrik)	Kuantan Baru	Kp. Dagang	Kp. Besar Kota	Pasar Kota	Sekip Hulu
Vit.Non Ekonomi	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah
Vit. Ekonomi	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
Status Tanah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
Kondisi Prasarana Sarana	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah
Komit. Pemerintah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka kawasan permukiman yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh adalah Desa Kampung Besar Kota (Gambar 5).



Gambar 5. Peta Desa Kampung Besar Kota

Desa Kampung Besar Kota merupakan pemukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pemukiman ini memiliki pertumbuhan bangunan liar yang tinggi untuk setiap tahunnya. Kepadatan bangunan di pemukiman ini mencapai antara 60-100 rumah per hektar. Bangunan temporer pada kawasan pemukiman ini tergolong sedang. Bangunan-bangunan di kawasan pemukiman tersebut memiliki tapak bangunan yang lebih dari 70%. Jarak antarbangunan di pemukiman tersebut cenderung rapat dengan jarak kurang dari 1.5 meter (Gambar 6).



Gambar 6. Kondisi Bangunan pada Kawasan

Kondisi kependudukan di desa ini memiliki jumlah kepadatan penduduk antara 400-500 jiwa per hektar. Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk tergolong sedang yaitu dari 1.7%-2.1% per tahun.

Desa Kampung Besar Kota merupakan pemukiman yang memiliki tingkat kepentingan yang sangat strategis terhadap kota. Mayoritas penduduk di pemukiman tersebut memiliki pekerjaan di pusat kota, sehingga jarak jangkauan pemukiman dengan pusat kota tergolong dekat. Dan pemukiman tersebut berada di dalam kawasan pusat kegiatan bisnis kota. Status kepemilikan lahan kawasan pemukiman ini memiliki sertifikat Hak Milik lebih dari 50% dan kepemilikan tanah milik masyarakat lebih dari 50%.

Kondisi jalan di pemukiman ini masih kurang karena masih banyak yang belum disemenisasi (Gambar 7). Penyediaan air bersih masih sangat kurang sehingga masyarakat masih menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih dan melalui sistem pemipaan sederhana. Beberapa masyarakatnya masih menggunakan kamar mandi dan wc yang langsung di sungai (Gambar 8). Persampahan masih menyebar di seluruh lingkungan kawasan pemukiman ini.



Gambar 7. Sirkulasi Jalan Masih Menggunakan Papan



Gambar 8. Penggunaan WC Umum di Sungai

Berdasarkan penilaian terhadap kekumuhan kawasan permukiman Kampung Besar Kota mendapatkan nilai kategori tinggi dan menjadi prioritas utama untuk segera di tangani. Adapun strategi penanganan permukiman kumuh dengan pendekatan Property Development yang terdiri dari Rencana Rumah Layak Huni, Membatasi Pertumbuhan permukiman baru, Rencana Tata Hijau, Rencana Sarana dan Prasarana, Komponen Kelengkapan kawasan, Ruang terbuka Hijau.

Letak geografis Kampung Besar Kota berada di bantaran sungai Indragiri, dari pengamatan langsung di lokasi, bahwa jumlah permukiman baru selalu bertambah ke arah pinggir sungai. Hal ini terjadi pada saat air sungai surut kemudian pendatang baru atau masyarakat mulai membangun bangunan non permanen diatas perairan. Pertambahan bangunan liar non permanen di bantaran sungai tersebut selain membahayakan keselamatan jiwa juga menyebabkan bertambahnya nilai kekumuhan pada wajah Kampung Besar Kota. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Arah Pengembangan Eksisting Desa Kampung Besar Kota

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan adanya pembatasan pertumbuhan pembangunan permukiman ke arah sungai yang menempati lahan sepadan. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara (Gambar 10), yaitu:

1. Membangun turap di sepanjang lahan kritis
2. Membangun jalan yang menghubungkan setiap akses dalam Kampung Besar Kota, pembangunan jalan ini dimaksudkan di samping menahan pertumbuhan rumah liar, juga sebagai akses untuk inspeksi sungai dan kontrol sosial pada lahan pinggir sungai.



Gambar 10. Arah Pembangunan Jalan Desa Kampung Besar Kota

Konsep perencanaan ruang terbuka dan tata hijau pada kawasan perencanaan ini lebih tertuju pada pengembangan ruang di luar bangunan dengan peruntukkan sebagai wadah fasilitas rekreasi keluarga dan pembentuk jalur sirkulasi dalam kawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap kriteria penilaian kawasan permukiman di sepadan Sungai Indragiri (Kecamatan Rengat) Kabupaten Indragiri Hulu diperoleh bahwa Desa Kampung Besar Kota termasuk ke dalam kategori permukiman kumuh tingkat tinggi. Kategori tingkat tinggi pada kawasan ini menggunakan pendekatan strategi *Property Development* sebagai penanganan kawasan. Pendekatan strategi ini terdiri dari rencana rumah layak huni, membatasi pertumbuhan permukiman baru, rencana tata hijau, rencana sarana dan prasarana, komponen kelengkapan kawasan, ruang terbuka hijau. Tahap awal adalah membatasi pertumbuhan permukiman baru dengan membangun turap dan jalan di sepanjang sepadan Sungai Indragiri.

Daftar Pustaka

- Anonim (2006) *Buku Pedoman Umum NUSSP*, Versi-2, Dirjen Cipta Karya. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum RI.
- Anonim (2006) *Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan*, Direktorat Pengembangan Permukiman, Dirjen Cipta Karya. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum RI.
- Dyah, Ratih Wahyu., Kurniawan, Eddii Basuki., Usman, Fadli (2010) Penataan Permukiman di Kawasan Segiempat Tunjungan Kota Surabaya. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 2(2), 1-8.
- Hariyanto, Asep (2006) Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat (Kasus: Kota Pangkalpinang). *Jurnal PWK Unisba*, 11-35.
- Kadir, Ishak (2010) Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bau-Bau. *Metropilar*, 8(2), 251-259.
- Putro, Jawas Dwijo (2011) Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil Untan*, 11(1), 19-34.
- Suhaeri, Heni (2010) Tipologi Kawasan Perumahan Kepadatan Penduduk Tinggi dan Penanganannya. *Jurnal Permukiman*, 5(3), 116-123.
- Sulestianson, Erick., & Indrajati, Petrus Natavilan. Penanganan Permukiman Kumuh dengan Pendekatan Karakteristik dan Faktor Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus : Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari dan Kelurahan Braga). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK*, 3(2), 263-273.
- Surahman, Usep (2008) Perbaikan Daerah Kumuh (Slum) dan Liar (Squatter). Kasus Kampung Neglasari Selatan Kecamatan Padasuka Kota Bandung. *Artikel Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.